

Judul : Korupsi e-KTP - Penyidik Gali Keterangan Eks Pimpinan Banggar
Tanggal : Jumat, 27 Januari 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

:: KORUPSI E-KTP

Penyidik Gali Keterangan Eks Pimpinan Banggar

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin memanggil sejumlah pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2009-2014. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Untuk pertemuan di luar DPR dari beberapa saksi itu hal yang didalamasi.”

FEBRI DIANSYAH
Juru Bicara KPK

Ada empat mantan pimpinan Banggar DPR yang diperiksa sebagai saksi. Keempatnya adalah mantan Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKS yang kini anggota Komisi VII DPR Tamsil Linrung, mantan Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Partai Demokrat Mirwan Amir, mantan Wakil Ketua Banggar yang kini Bendahara Umum DPP PDIP dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan mantan Ketua Banggar dari Fraksi Partai Golkar yang kini Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng.

Satu saksi lagi adalah Arista Gunawan selaku pengelola dokumen alat ukur dan pemetaan Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Jakarta Selatan. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan e-KTP yang juga Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Sugiharto.

Juru Bicara KPK Febri Dian-syah menyatakan, 5 saksi dengan 4 mantan pimpinan Banggar DPR yang diperiksa kemarin punya alasan kuat. Menurut dia, pemeriksaan itu untuk mencari tahu pembahasan anggaran di DPR. Berikutnya, pen-dalaman terhadap komunikasi-komunikasi yang terjadi. “Men-ge-nai informasi yang pernah di-sam-pai-kan Nazaruddin atau oleh pihak-pihak lain, tentu itu

menjadi salah satu informasi yang juga kita dalam,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam.

Penyidik, menurutnya, tentu tidak langsung secara otomatis mengiyakan tanpa melakukan kroscek atau memastikan kesesuaian dengan informasi dan bukti-bukti yang lain. Proses kroscek atau memastikan kesesuaian itulah yang sedang dilakukan dalam kasus e-KTP.

Lebih dari itu, Febri menggariskan, sedang ditelusuri dan divalidasi juga adanya pertemuan di luar DPR antara anggota DPR, termasuk oknum pimpinan Banggar, dengan pejabat Kemendagri dan pengusaha untuk pembagian jatah *fee*. “Belum kita terima informasi itu (pembagian jatah *fee*). Untuk pertemuan di luar DPR dari beberapa saksi itu hal yang didalamasi. Karena memang pembahasan anggaran tentu saja tidak hanya terjadi dalam pembahasan formal, tetapi juga ada indikasi-indikasi pertemuan lain,” ujarnya.

Febri mengatakan, KPK mempersilakan para pihak termasuk empat mantan pimpinan Banggar membantah menerima dugaan aliran uang atau meminta ditunjukkan bukti. Yang pasti, KPK berusaha mengumpulkan bukti dan siap membuktikan bila ada bukti para terduga menerima uang. “Saat ini mereka statusnya masih sebagai saksi. Tentu saja indikasi-indikasi penerimaan atau keterlibatan saat ini masih fokus dalam dua tersangka S dan IR,” paparnya.

Olly Dondokambey meram-pungkan pemeriksaan sekitar pukul 16.15 WIB. Olly sedikit emosi saat disinggung kesaksi-an dan data yang disampaikan terpidana mantan anggota DPR sekaligus mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin sebelumnya menyebutkan Olly kecipratan uang sekitar USD500.000 hingga USD1 juta. “Bohonglah, kalian kan lebih tahu. Enggak benar. Kalau ada bukti, lu (media) kasih lihat, gua tuntut lu (media),” tandas Olly.

Dia mengaku, saat pembahas-an dan pengesahan ang-ga-ran di Banggar, tidak ada kesepakatan di bawah tangan untuk menyetujui anggaran proyek e-KTP senilai hampir Rp6 triliun.

● **sabir laluhu**